



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuhbelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);

25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Rembang, PD BPR BKK Lasem, PD BKK Kaliori dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 4)

36. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	291.855.438.071,00
b. Dana perimbangan	Rp	1.036.414.856.000,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	406.869.212.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.785.139.506.071,00

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	693.272.542.605,00
2) Belanja Bunga	Rp	1.131.632.000,00
3) belanja hibah	Rp	48.064.900.000,00
4) belanja bantuan sosial	Rp	7.284.660.000,00
5) belanja bagi hasil	Rp	11.944.474.000,00
6) belanja bantuan keuangan	Rp	381.339.509.700,00
7) belanja tidak terduga	Rp	1.000.000.000,00
	Rp	1.144.037.719.205,00
b. Belanja Langsung		
1) belanja pegawai	Rp	179.311.949.050,00
2) belanja barang dan jasa	Rp	310.601.673.112,00
3) belanja Modal	Rp	193.557.009.547,00
	Rp	683.470.631.709,00

Jumlah Belanja	Rp	1.827.508.350.914,00
Defisit	(Rp	42.368.844.843,00)

3. Pembiayaan

a. penerimaan	Rp	49.237.212.843,00
b. pengeluaran	Rp	6.868.368.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	42.368.844.843,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penjabaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2018
BUPATI REMBANG


ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 63



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	
		1.785.139.506.071,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	291.855.438.071,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	96.850.500.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.158.499.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.030.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.816.439.071,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.086.414.856.000,00
1.2.1	Dana Transfer Umum	842.646.897.000,00
1.2.2	Dana Transfer Khusus	243.767.959.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	406.869.212.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	58.432.800.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	258.436.412.000,00
2	BELANJA	1.827.508.350.914,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.144.037.719.205,00
2.1.1	Belanja Pegawai	693.272.542.605,00
2.1.2	Belanja Bunga	1.131.632.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	48.064.900.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.284.660.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11.944.474.900,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	381.339.509.700,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	683.470.631.709,00
2.2.1	Belanja Pegawai	179.311.949.050,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.601.673.112,00
2.2.3	Belanja Modal	193.557.009.547,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(42.368.844.843,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	49.237.212.843,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.237.212.843,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.868.368.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	3.868.368.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	42.368.844.843,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI REMBANG


ABDUL HAFIDZ



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN 1a :
PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4	PENDAPATAN		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.785.139.506,071,00	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	291.855.438,071,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	96.850.500.000,00	
4.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.000.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	805.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	90.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	80.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02	Pajak Restoran	25.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02.02	Rumah Makan	2.500.000.000,00	
4.1.1.02.05	Katering	100.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.02.06	Warung	2.370.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03	Pajak Hiburan	30.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	200.000.000,00	
4.1.1.03.07	Karaoke	20.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.20	Permainan Play Station/Video Game	169.800.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.03.22	Hiburan Lainnya	200.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04	Pajak Reklame	10.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	800.000.000,00	
4.1.1.04.02	Reklame Kain	607.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.04.03	Reklame Melekat/Stiker	190.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	24.000.000.000,00	
4.1.1.07	Pajak Parkir	24.000.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	20.000.000,00	
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	20.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	
		200.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	
4.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	7.500.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.10	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.483.750.000,00	
4.1.1.10.01	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	9.483.750.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2011
4.1.1.11	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	45.639.250.000,00	
4.1.1.11.04	Batu Kapur	28.064.250.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.06	Andesit	4.000.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.07	Trass	12.000.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.09	Pasir Kwarsa	500.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.13	Tanah Urug	400.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.16	Pasir	100.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.17	Tanah Liat	500.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.1.11.18	Limbah Bahan Galian	75.000.000,00	
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.000.000.000,00	
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.000.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2011
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	23.158.499.000,00	
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	5.043.110.000,00	
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	215.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	819.374.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	15.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	305.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	2.776.736.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	550.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.01.12	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	362.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2011
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	16.994.639.000,00	
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.872.660.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.02	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	198.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	13.440.815.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	231.379.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	91.250.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	45.525.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.019.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	96.010.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2011
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.120.750.000,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.100.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	20.750.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perbankan Perbankan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan Penjualan Drum Bekas Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Penerimaan Bunga Deposito Rekening Deposito Pada Bank Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha Penerimaan Lain-lain Sewa kios dan gudang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pendapatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	10.030.000.000,00	Perda Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2013
4.1.3.01		4.530.000.000,00	
4.1.3.01.01		4.530.000.000,00	
4.1.3.04		5.500.000.000,00	
4.1.3.04.01		5.500.000.000,00	
4.1.4		161.816.439.0/1,00	
4.1.4.01		20.000.000,00	
4.1.4.01.07		20.000.000,00	
4.1.4.02		5.991.454.235,06	
4.1.4.02.01		5.991.454.235,00	
4.1.4.03		5.983.140.471,00	Keputusan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2000
4.1.4.03.01		5.983.140.471,00	
4.1.4.08		2.267.765,00	
4.1.4.08.01		2.025.000,00	
4.1.4.08.02		242.765,00	
4.1.4.14		278.809.000,00	
4.1.4.14.02		278.809.000,00	
4.1.4.16		149.540.767.600,00	
4.1.4.16.01		105.000.000.000,00	
4.1.4.16.02		44.540.767.600,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Ps.25, Ps.29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Ps.21 DBH Cukai Hasil Tembakau DBH Cukai Hasil Tembakau DBH- Sumber Daya Alam Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi (Migas)	1.086.414.856.000,00	Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2016
4.2.1		842.646.897.000,00	
4.2.1.01		26.359.122.000,00	
4.2.1.01.01		9.459.836.000,00	
4.2.1.01.02		16.899.286.000,00	
4.2.1.02		18.665.000.000,00	
4.2.1.02.01		18.665.000.000,00	
4.2.1.03		1.886.488.000,00	
4.2.1.03.02		736.354.000,00	
4.2.1.03.07		943.027.000,00	
4.2.1.03.08		181.972.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Bagi Hasil Dari Pajak Air Permukaan Bagi Hasil Dari Pajak Rokok Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Dana Desa	90.000.000.000,00	
4.3.3.01		90.000.000.000,00	
4.3.3.01.01		17.000.000.000,00	
4.3.3.01.02		16.990.000.000,00	
4.3.3.01.03		30.000.000.000,00	
4.3.3.01.07		10.000.000,00	
4.3.3.01.08		26.000.000.000,00	
4.3.4		258.436.412.000,00	
4.3.4.01		258.436.412.000,00	
4.3.4.01.03		258.436.412.000,00	
5	BELANJA		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.827.508.350.914,00	
5.1.1	Belanja Pegawai	1.144.037.719.205,00	
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	693.272.542.605,00	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	615.972.579.380,00	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	371.345.000.556,00	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	32.697.737.820,00	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.552.587.450,00	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	24.041.110.955,00	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	5.682.568.600,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPhy/Tunjangan Khusus	18.149.635.879,00	
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	1.552.736.375,00	
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	5.017.284,00	
5.1.1.01.10	Uang Paket	10.628.157.469,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	86.058.000,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	27.954.000,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	55.907.000,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	29.415.000,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	7.857.000,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	17.844.000,00	
5.1.1.01.17	Uang Jasa Pengabdian	4.821.024.000,00	
5.1.1.01.18	Dana Operasional Pimpinan DPRD	404.880.000,00	
5.1.1.01.20	Tunjangan Badan Legislasi	252.000.000,00	
5.1.1.01.22	Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja	14.434.000,00	
5.1.1.01.23	Iuran Asuransi Kematian	776.238.567,00	
		2.340.876.425,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.1.01.24	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Tunjangan Profesi Guru PNS Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD Dana Operasional KDH/WKDH Tunjangan Reses Tunjangan Transportasi Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Pajak Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Belanja Bunga Bunga Utang Pinjaman Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi..... Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa lainnya Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	876.000.000,00 134.607.539.000,00 60.264.963.225,00 60.264.963.225,00 12.115.500.000,00 5.670.000.000,00 600.000.000,00 1.417.500.000,00 4.428.000.000,00 3.532.500.000,00 3.532.500.000,00 1.387.000.000,00 1.387.000.000,00 1.387.000.000,00 1.131.632.000,00 1.131.632.000,00 1.131.632.000,00 48.064.900.000,00 48.064.900.000,00 48.064.900.000,00 7.284.660.000,00 7.284.660.000,00 7.284.660.000,00 11.944.474.900,00 9.628.625.000,00 9.628.625.000,00 2.315.849.900,00 2.315.849.900,00 381.339.509.700,00 380.248.553.700,00 380.248.553.700,00	
5.1.1.01.25			
5.1.1.02			
5.1.1.02.01			
5.1.1.03			
5.1.1.03.01			
5.1.1.03.02			
5.1.1.03.04			
5.1.1.03.05			
5.1.1.05			
5.1.1.05.01			
5.1.1.06			
5.1.1.06.01			
5.1.2			
5.1.2.01			
5.1.2.01.03			
5.1.4			
5.1.4.05			
5.1.4.05.01			
5.1.5			
5.1.5.01			
5.1.5.01.01			
5.1.6			
5.1.6.03			
5.1.6.03.01			
5.1.6.05			
5.1.6.05.01			
5.1.7			
5.1.7.04			
5.1.7.04.03			

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.090.956.000,00	
5.1.7.05.01		1.090.956.000,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.1.8.01		1.000.000.000,00	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	
5.2	BELANJA LANGSUNG	683.470.631.709,00	
5.2.1		179.311.949.050,00	
5.2.1.01	Belanja Pegawai	30.759.490.700,00	
5.2.1.01.01	Honorarium PNS	16.874.693.700,00	
5.2.1.01.02	Honorarium Panitia/Pelaksana Kegiatan	207.275.000,00	
5.2.1.01.03	Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	100.555.000,00	
5.2.1.01.04	Honorarium Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	4.177.472.000,00	
5.2.1.01.05	Honorarium Harian/Perseorangan	9.033.015.000,00	
5.2.1.01.06	Honor Pelaksana Administrasi Kegiatan	65.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.1.01.07	Honor Tim Penilai Angka Kredit	18.430.000,00	
5.2.1.01.11	Honor Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Kelurahan	283.050.000,00	
5.2.1.02	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	73.439.782.350,00	
5.2.1.02.01	Honorarium Non PNS	3.827.216.000,00	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	36.390.546.350,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.1.02.03	Honorarium Harian	32.112.390.000,00	
5.2.1.02.04	Honorarium Bulanan	650.250.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.1.02.05	Honor Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tingkat Desa	459.380.000,00	
5.2.1.05	Honorarium Pelaksana Administrasi Kegiatan	75.112.676.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah	45.569.151.000,00	
5.2.1.05.02	Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Soetrasno	29.543.525.000,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	310.601.673.112,00	
5.2.2.01		15.312.685.348,00	
5.2.2.01.01	Belanja Bahan Pakai Habis	4.333.215.288,00	
5.2.2.01.02	Belanja Alat Tulis Kantor	574.010.984,00	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	104.924.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Material Dan Benda Pos Lainnya	899.866.835,00	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan dan bahan pembersih	4.663.841.100,00	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Sarana Mobilitas	11.060.000,00	
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung/Gas/Oksigen	311.271.250,00	
5.2.2.01.07	Belanja Dokumentasi		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.01.08	Belanja Dekorasi	1.157.050,815,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.2.01.09	Belanja Linen	2.841.800,00	
5.2.2.01.11	Belanja rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	337.000.000,00	
5.2.2.01.15	Belanja perlengkapan peserta pelatihan/sosialisasi	1.074.078.062,00	
5.2.2.01.16	Belanja sarana dan prasarana kesehatan	175.030.680,00	
5.2.2.01.17	Belanja karangan bunga dan bunga tabur	25.800.000,00	
5.2.2.01.18	Belanja perlengkapan dan peralatan kantor	196.152.139,00	
5.2.2.01.19	Belanja perlengkapan dan peralatan rumah tangga	201.379.630,00	
5.2.2.01.20	Belanja perlengkapan dan peralatan penangnanan bencana	2.795.625,00	
5.2.2.01.21	Belanja perlengkapan dan peralatan olah raga	72.235.100,00	
5.2.2.01.22	Belanja peralatan praktek	27.020.440,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.2.01.23	Belanja Bahan Bakar/Pelumas Non Sarana Mobilitas	148.721.600,00	
5.2.2.01.24	Belanja transportasi	994.390.000,00	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	10.735.841.927,00	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	1.556.647.150,00	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	449.599.000,00	
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	67.000.000,00	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan dan Laborat	5.612.528.684,00	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	69.013.740,00	
5.2.2.02.06	Belanja bahan praktek ketrampihan/percontohan	632.095.694,00	
5.2.2.02.07	Belanja bahan pakan ternak	3.000.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.2.02.08	Belanja perlengkapan Rumah Sakit Umum dan Puskesmas	3.000.000,00	
5.2.2.02.09	Belanja bahan kendaraan tidak bermotor	26.245.425,00	
5.2.2.02.11	Belanja bahan semen beku (straw IB)	39.250.000,00	
5.2.2.02.13	Belanja bahan konstruksi jaringan listrik	5.050.000,00	
5.2.2.02.15	Belanja bahan peralatan Alat Peraga Edukatif (APE)	32.713.840,00	
5.2.2.02.16	Belanja bahan peralatan studio	27.000.000,00	
5.2.2.02.18	Belanja perlengkapan budi daya	19.300.000,00	
5.2.2.02.19	Belanja bahan bercorak seni budaya	23.000.000,00	
5.2.2.02.20	Belanja bahan dan jaringan komputer	1.220.387.294,00	
5.2.2.02.21	Belanja bahan meubelair	24.400.000,00	Peraturan Bupati Rembang
5.2.2.02.22	Belanja bahan kelistrikan	118.063.500,00	
5.2.2.02.23	Belanja bahan komunikasi	5.000.000,00	
5.2.2.02.24	Belanja bahan instalasi	94.600.000,00	
5.2.2.02.25	Belanja bahan kendaraan bermotor	58.345.200,00	
5.2.2.02.26	Belanja bahan pameran	29.150.000,00	
5.2.2.02.27	Belanja bahan program Keluarga Berencana	393.660.000,00	
5.2.2.02.29	Belanja Bahan Lainnya	198.292.400,00	
5.2.2.02.32	Belanja Pakan Ikan	28.500.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	20.647.885.435,00	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	789.903.758,00	
5.2.2.03.02	Belanja Air	234.675.000,00	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	13.729.805.442,00	
5.2.2.03.04	Belanja Jasa Pengumuman	5.250.000,00	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	310.912.500,00	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	889.110.750,00	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	28.470.150,00	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	173.800.000,00	
5.2.2.03.12	Belanja jasa pajak-pajak	28.510.000,00	
5.2.2.03.13	Belanja jasa pelayanan kesehatan	24.500.000,00	
5.2.2.03.14	Belanja jasa kebersihan	627.358.225,00	
5.2.2.03.15	Belanja jasa penyusunan software	506.418.270,00	
5.2.2.03.16	Belanja jasa service	1.062.144.340,00	
5.2.2.03.17	Belanja jasa hosting dan domain	58.650.000,00	
5.2.2.03.18	Belanja jasa promosi	704.000.000,00	
5.2.2.03.20	Belanja jasa pemeliharaan tower	5.000.000,00	
5.2.2.03.21	Belanja jasa analisis laboratorium	56.163.000,00	
5.2.2.03.24	Belanja jasa komunikasi	29.000.000,00	
5.2.2.03.25	Belanja jasa institusi	860.000.000,00	
5.2.2.03.27	Belanja jasa setting sarana pelayanan	27.500.000,00	
5.2.2.03.33	Belanja jasa pertunjukan/hiburan	310.450.000,00	
5.2.2.03.34	Belanja jasa parkir kendaraan	292.950,00	
5.2.2.03.35	Belanja jasa dokumentasi	92.171.050,00	
5.2.2.03.36	Belanja Jasa Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Listrik	55.800.000,00	
5.2.2.03.38	Belanja Jasa Pemasangan Jaringan Listrik/Telepon/Air	17.000.000,00	
5.2.2.03.39	Belanja Jasa Uji Laboratorium	21.000.000,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	15.646.676.000,00	
5.2.2.04.02	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	38.770.000,00	
5.2.2.04.03	Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS	15.573.718.000,00	
5.2.2.04.04	Belanja Premi Asuransi Kematan Non PNS	23.688.000,00	
5.2.2.04.07	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Non PNS	10.500.000,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	2.183.108.472,00	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	548.399.226,00	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	790.959.694,00	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	105.202.960,00	
5.2.2.05.04	Belanja Bahan Pelumas	210.240.900,00	
5.2.2.05.05	Belanja Jasa KIR	8.140.000,00	
5.2.2.05.06	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	335.690.742,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1		2	3	4
5.2.2.05.07 5.2.2.05.08 5.2.2.06 5.2.2.06.01 5.2.2.06.02 5.2.2.06.03 5.2.2.07 5.2.2.07.02 5.2.2.07.03 5.2.2.07.05 5.2.2.07.06 5.2.2.08 5.2.2.08.01 5.2.2.08.02 5.2.2.08.03 5.2.2.10 5.2.2.10.01 5.2.2.10.03 5.2.2.10.04 5.2.2.10.05 5.2.2.10.06 5.2.2.10.07 5.2.2.10.08 5.2.2.10.09 5.2.2.10.13 5.2.2.10.15 5.2.2.10.17 5.2.2.10.18 5.2.2.11 5.2.2.11.01 5.2.2.11.02 5.2.2.11.03 5.2.2.11.04 5.2.2.11.05 5.2.2.11.06 5.2.2.11.07 5.2.2.12		Belanja Pengelasan dan Pengecatan Belanja Perawatan Kendaraan Lainnya Belanja Cetak dan Pengandaan Belanja Cetak Belanja Pengandaan Belanja Penjilidan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan Belanja sewa penginapan Belanja sewa tanah/lahan Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Meja Kursi Belanja Sewa Proyektor/LCD Belanja Sewa Generator Belanja Sewa Tenda Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional Belanja Sewa Alat Musik/Sound System Belanja Sewa Dekorasi Belanja sewa dokumentasi Belanja sewa gamelan Belanja sewa alat olah raga Belanja Sewa Lampu Penerangan Belanja Sewa alat pendingin ruangan Belanja Makanan dan Minuman Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai Belanja Makanan Dan Minuman Rapat Belanja Makanan Dan Minuman Tamu Belanja makanan dan minuman Pasien Belanja Makanan dan Minuman Tambahan Belanja Makanan dan Minuman Pelatihan/Sosialisasi Belanja Makanan dan Minuman Lainnya Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	16.750.000,00 167.724.950,00 6.160.582.660,00 2.750.541.391,00 2.975.371.441,00 434.669.828,00 1.604.425.000,00 865.800.000,00 215.250.000,00 510.375.000,00 13.000.000,00 1.186.993.282,00 1.150.043.282,00 1.200.000,00 35.750.000,00 1.263.243.395,00 228.700.000,00 5.100.000,00 28.580.000,00 300.030.000,00 26.975.000,00 466.550.000,00 158.580.095,00 5.328.300,00 9.000.000,00 4.400.000,00 5.000.000,00 25.000.000,00 25.674.067.870,00 1.558.787.190,00 15.825.381.680,00 1.240.337.000,00 14.250.000,00 498.238.000,00 5.441.469.000,00 1.095.605.000,00 774.200.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	96.000.000,00	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	177.300.000,00	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	191.625.000,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	145.800.000,00	
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian PSR	162.675.000,00	
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	800.000,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	82.594.799,00	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	82.594.799,00	
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1.744.187.367,00	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	76.900.000,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	534.845.000,00	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	731.441.539,00	
5.2.2.14.05	Belanja pakaian khusus lainnya	401.000.828,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	51.667.681.185,00	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	15.746.146.800,00	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	35.676.534.385,00	
5.2.2.15.03	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	245.000.000,00	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	30.000.000,00	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	30.000.000,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dan non PNS	7.942.161.740,00	
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	5.346.659.090,00	
5.2.2.17.02	Belanja Sosialisasi	2.360.646.650,00	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	234.856.000,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	1.671.147.460,00	
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Gedung	855.867.010,00	
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Taman	252.450.000,00	
5.2.2.20.10	Belanja Pemeliharaan Instalasi/Jaringan Listrik	3.000.000,00	
5.2.2.20.13	Belanja Pemeliharaan Lalu Lintas Jalan	39.450.000,00	
5.2.2.20.14	Belanja Pemeliharaan Arsip	60.380.000,00	
5.2.2.20.15	Belanja Pemeliharaan Lainnya	460.000.450,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.343.913.000,00	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	164.500.000,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	594.745.000,00	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	88.218.000,00	
5.2.2.21.06	Belanja Jasa Konsultansi Analisa Belanja Publik	38.000.000,00	
5.2.2.21.07	Belanja Jasa Konsultansi Survei dan Pemetaan	59.600.000,00	
5.2.2.21.09	Belanja Jasa Konsultansi Swakelola dengan Instansi Lain	240.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5.2.2.21.10	Belanja Jasa Konsultansi Swakelola dengan Kelompok Masyarakat	1.158.850.000,00	
5.2.2.23	Belanja Hibah Barang atau Jasa	62.064.902.167,00	
5.2.2.23.01	Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	62.064.902.167,00	
5.2.2.24	Belanja Bantuan Sosial Barang	610.826.155,00	
5.2.2.24.01	Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	610.826.155,00	
5.2.2.25	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	75.490.075,00	
5.2.2.25.02	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	75.490.075,00	
5.2.2.26	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat (hadiah, penghargaan)	8.339.129.245,00	
5.2.2.26.01	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	426.121.000,00	
5.2.2.26.02	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	7.913.008.245,00	
5.2.2.27	Belanja Jasa Lainnya	7.817.747.000,00	
5.2.2.27.02	Belanja Jasa Tes Kesehatan	480.000,00	
5.2.2.27.03	Belanja Jasa Kegiatan Outbond	99.981.000,00	
5.2.2.27.04	Belanja Jasa Event Organizer	6.186.786.000,00	
5.2.2.27.05	Belanja Jasa Pejuang	18.000.000,00	
5.2.2.27.06	Belanja Jasa Pengabdian	7.000.000,00	
5.2.2.27.07	Belanja Jasa Pelayanan Medical Chek Up	221.500.000,00	
5.2.2.27.09	Belanja Persalinan	1.284.000.000,00	
5.2.2.28	Uang Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat (Hadiah, Penghargaan)	934.700.000,00	
5.2.2.28.01	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga	346.900.000,00	
5.2.2.28.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	587.800.000,00	
5.2.2.30	Belanja Beasiswa Pendidikan	3.364.000.000,00	
5.2.2.30.01	Belanja Beasiswa Pendidikan Dasar	656.000.000,00	
5.2.2.30.02	Belanja Beasiswa Pendidikan Menengah	292.000.000,00	
5.2.2.30.03	Belanja Beasiswa Pendidikan Tinggi	2.416.000.000,00	
5.2.2.31	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	4.389.682.170,00	
5.2.2.31.01	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/instruktur	4.389.682.170,00	
5.2.2.32	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah	56.203.601.360,00	
5.2.2.32.01	Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. R. Soetrasno	39.450.849.000,00	
5.2.2.32.02	Belanja Barang dan Jasa Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas	16.752.752.360,00	
5.2.2.34	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	130.200.000,00	
5.2.2.34.01	Belanja Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	130.200.000,00	
5.2.3	Belanja Modal	193.557.009.547,00	
5.2.3.13	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	100.000.000,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1		2	3	4
5. 2. 3. 13. 02		Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir	100.000.000,00	
5. 2. 3. 14		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	29.025.000,00	
5. 2. 3. 14. 01		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor	29.025.000,00	
5. 2. 3. 16		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	8.470.000,00	
5. 2. 3. 16. 07		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan	8.470.000,00	
5. 2. 3. 17		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	11.636.572.670,00	
5. 2. 3. 17. 01		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.893.148.670,00	
5. 2. 3. 17. 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	2.912.350.000,00	
5. 2. 3. 17. 03		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	400.000.000,00	
5. 2. 3. 17. 04		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	2.760.100.000,00	
5. 2. 3. 17. 05		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	639.974.000,00	
5. 2. 3. 17. 06		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	31.000.000,00	
5. 2. 3. 18		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	168.500.000,00	
5. 2. 3. 18. 01		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	68.500.000,00	
5. 2. 3. 18. 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang	100.000.000,00	
5. 2. 3. 22		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	3.848.600,00	
5. 2. 3. 22. 03		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik	3.848.600,00	
5. 2. 3. 24		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	680.062.500,00	
5. 2. 3. 24. 08		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Perbanding	24.800.000,00	
5. 2. 3. 24. 09		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya	434.562.500,00	
5. 2. 3. 24. 10		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Biora	20.800.000,00	
5. 2. 3. 24. 11		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa	199.900.000,00	
5. 2. 3. 26		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	3.000.000,00	
5. 2. 3. 26. 03		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	3.000.000,00	
5. 2. 3. 27		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	2.187.974.652,00	
5. 2. 3. 27. 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	401.200,00	
5. 2. 3. 27. 04		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perangkat Kantor	135.702.472,00	
5. 2. 3. 27. 05		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya	2.051.870.980,00	
5. 2. 3. 28		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	3.277.378.944,00	
5. 2. 3. 28. 01		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	1.998.716.834,00	
5. 2. 3. 28. 02		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	9.791.250,00	
5. 2. 3. 28. 03		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	31.367.850,00	
5. 2. 3. 28. 04		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	931.385.700,00	
5. 2. 3. 28. 05		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	12.043.040,00	
5. 2. 3. 28. 06		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	291.074.270,00	
5. 2. 3. 28. 07		Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5. 2. 3. 29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	7.744.084.465,00	
5. 2. 3. 29. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	4.180.373.065,00	
5. 2. 3. 29. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	474.697.800,00	
5. 2. 3. 29. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	32.200.000,00	
5. 2. 3. 29. 05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	871.801.400,00	
5. 2. 3. 29. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	2.185.012.200,00	
5. 2. 3. 30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	41.701.000,00	
5. 2. 3. 30. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	15.000.000,00	
5. 2. 3. 30. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	12.394.000,00	
5. 2. 3. 30. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	10.000.000,00	
5. 2. 3. 30. 07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Aisip Pejabat	4.307.000,00	
5. 2. 3. 31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.726.168.750,00	
5. 2. 3. 31. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.639.382.600,00	
5. 2. 3. 31. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	23.727.400,00	
5. 2. 3. 31. 03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A	55.558.750,00	
5. 2. 3. 31. 06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	7.500.000,00	
5. 2. 3. 32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	607.350.000,00	
5. 2. 3. 32. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	497.350.000,00	
5. 2. 3. 32. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	110.000.000,00	
5. 2. 3. 33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	1.500.000,00	
5. 2. 3. 33. 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	1.500.000,00	
5. 2. 3. 34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	3.149.326.076,00	
5. 2. 3. 34. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	2.126.805.076,00	
5. 2. 3. 34. 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	29.850.000,00	
5. 2. 3. 34. 04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata	500.000,00	
5. 2. 3. 34. 09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	51.950.000,00	
5. 2. 3. 34. 10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam	17.200.000,00	
5. 2. 3. 34. 20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat	719.696.000,00	
5. 2. 3. 34. 22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Hewan	203.325.000,00	
5. 2. 3. 35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.500.000,00	
5. 2. 3. 35. 01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	1.500.000,00	
5. 2. 3. 36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	359.103.750,00	
5. 2. 3. 36. 12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	31.500.000,00	
5. 2. 3. 36. 14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran	9.000.000,00	
5. 2. 3. 36. 16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kimia	137.200.000,00	

NOMOR URUT		URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4	
5.2.3.36.20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi	128.200.000,00		
5.2.3.36.22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Makanan	7.500.000,00		
5.2.3.36.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	24.703.750,00		
5.2.3.36.55	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi	21.000.000,00		
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	892.452.600,00		
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	6.000.000,00		
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	886.452.600,00		
5.2.3.40	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	100.000.000,00		
5.2.3.40.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Proteksi Lingkungan	100.000.000,00		
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	36.308.300,00		
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Keamanan	36.308.300,00		
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	52.659.429.100,00		
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	3.699.311.700,00		
5.2.3.49.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang	221.850.000,00		
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	1.093.675.000,00		
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	475.000.000,00		
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	34.593.002.900,00		
5.2.3.49.11	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga	602.540.000,00		
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	4.424.122.000,00		
5.2.3.49.15	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan	502.150.000,00		
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	3.000.000.000,00		
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	100.000.000,00		
5.2.3.49.27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	3.947.777.500,00		
5.2.3.52	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah	200.000.000,00		
5.2.3.52.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah	200.000.000,00		
5.2.3.53	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	250.000.000,00		
5.2.3.53.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan	250.000.000,00		
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	2.377.580.000,00		
5.2.3.57.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat	2.277.580.000,00		
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	100.000.000,00		
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	63.400.107.000,00		
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	62.542.607.000,00		
5.2.3.59.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa	455.000.000,00		
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	402.500.000,00		
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	3.150.000.000,00		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
5. 2. 3. 92. 01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLUD	11.405.000.000,00	
		(42.368.844.843,00)	
6	PEMBIAYAAN DAERAH		
6. 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6. 1. 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.237.212.843,00	
6. 1. 1. 01	Pelampauan Penerimaan PAD	49.237.212.843,00	
6. 1. 1. 01. 01	Pajak Daerah	7.500.000.000,00	
6. 1. 1. 04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	7.500.000.000,00	
6. 1. 1. 04. 01	Belanja Pegawai Dari Belanja Tidak Langsung	30.128.096.016,00	
6. 1. 1. 04. 03	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000.000,00	
6. 1. 1. 04. 07	Belanja Hibah	25.128.096.016,00	
6. 1. 1. 04. 10	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	
6. 1. 1. 04. 11	Belanja Tidak Terduga	750.000.000,00	
6. 1. 1. 05	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai Dengan Akhir Tahun Belum Terealisasi	11.609.116.827,00	
6. 1. 1. 05. 05	Pihak Ketiga	11.609.116.827,00	
6. 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH		
6. 2. 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.868.368.000,00	
6. 2. 2. 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	3.000.000.000,00	
6. 2. 2. 02. 01	BUMD	3.000.000.000,00	
6. 2. 3	Pembayaran Pokok Utang	3.868.368.000,00	
6. 2. 3. 03	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank	3.868.368.000,00	
6. 2. 3. 03. 02	Pembayaran Pokok Hutang PT. Bank Jateng	3.868.368.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	42.368.844.843,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

Perda No. 4 Th 2017 dan Perda No. 3 Th 2017

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	PENJELASAN
1	2	3	4
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	896.940,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	896.940,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	11.900.000,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	11.900.000,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	5.380.000,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.380.000,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.31	Belanja Jasa narasumber/ tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	
4.05.4.05.08.10.17.5.2.2.31.01	Belanja Jasa narasumber/Tenaga ahli/Instruktur	4.000.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)		(11.722.340.150,00)	

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ